



RALAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN

NOMOR : Tu.01.02/203-Bagpebarjas/III/2022

TENTANG

PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE
PRODUK SEWA KENDARAAN

Berdasarkan persetujuan LKPP melalui Surat Deputy Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor : 4442/D.2.2/02/2022, Tanggal 25 Februari 2022, hal Surat Tanggapan Pencantuman Produk Katalog Elektronik Lokal Kota Bandung, Kami mengundang para Pelaku Usaha Produk Sewa Kendaraan Pemerintah Kota Bandung untuk turut serta dalam pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik. Rincian Produk, Persyaratan Penyedia dan Produk adalah sebagai berikut:

A. Informasi Produk

No	Kategori	No	Sub Kategori	No	Sub Sub Kategori
1	Dump Truck 6 M3		Bensin		Bulanan
					Tahunan
			Diesel		Bulanan
					Tahunan
			Listrik		Bulanan
					Tahunan
2	Truck Sampah Arm Roll 12 M3		Bensin		Bulanan
					Tahunan
			Diesel		Bulanan
					Tahunan
			Listrik		Bulanan
					Tahunan
3	Pick Up 4 M3		Bensin		Bulanan
					Tahunan
			Diesel		Bulanan
					Tahunan
			Listrik		Bulanan
					Tahunan
4	Dump Truck 12 M3		Bensin		Bulanan
					Tahunan
			Diesel		Bulanan
					Tahunan
			Listrik		Bulanan
					Tahunan
5	Truck Sampah Arm Roll 6 M3		Bensin		Bulanan
					Tahunan
			Diesel		Bulanan
					Tahunan
			Listrik		Bulanan
					Tahunan
6	Truck Tronton 24 m3		Bensin		Bulanan
					Tahunan
			Diesel		Bulanan
					Tahunan
			Listrik		Bulanan
					Tahunan

B. Syarat Penyedia :

1. Syarat Kualifikasi

- a. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- b. Memiliki NIB dan sertifikat standar, dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusaha telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 berlaku;
- c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa dengan lokasi Jawa Barat, yang dibuktikan dengan;
 - 1) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor;
 - 2) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor;
 - 3) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP); atau
 - 4) Dokumen lainnya yang sejenis.
- d. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, sebagai berikut:
 - ✓ Surat Izin Usaha yang berlaku efektif;
 - ✓ Bidang pekerjaan: KBLI 77100 bidang penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494;
 - ✓ Kualifikasi usaha: Kecil atau Non Kecil;
- e. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyetujui Pernyataan yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan

- 8) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 9) Dalam melaksanakan kegiatan agar menjaga dan menyelamatkan aset-aset Negara yang peruntukannya atau sifatnya untuk kepentingan umum;
- 10) Surat pernyataan kesanggupan mengganti barang-barang yang rusak/cacat atau tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah klaim diterima
- 11) Surat pernyataan (dalam satu formulir):
 - a) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi 100% kebutuhan tahunan Pemerintah Kota Bandung;
 - b) Surat pernyataan kesediaan pengantaran barang sesuai surat pesanan;
 - c) Surat pernyataan untuk merespon permintaan pembelian/*e-purchasing* dalam 3 hari kerja setelah permintaan tersebut dilakukan melalui *e-katalog*. Penyedia yang tidak merespon dalam 3 hari kerja dianggap tidak dapat memenuhi permintaan
- g. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
- h. Surat pernyataan bahwa badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- i. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan konfirmasi status wajib pajak;
- h. Memiliki pengalaman:

Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pengalaman pekerjaan sejenis sebagai penyedia dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

2. Syarat Teknis

- 1) Menyampaikan/ mengunggah informasi spesifikasi untuk setiap item produk yang ditawarkan pada aplikasi katalog elektronik;
- 2) mempunyai pengalaman sebagai penyedia jasa sewa kendaraan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun 3 tahun terakhir;
- 3) *Service Level Agreement (SLA)* minimal yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Usia Kendaraan
 - b. Asuransi *All Risk* dengan perlindungan dan manfaat sekurang-kurangnya meliputi :
 1. Kerusakan minor
 2. Kerusakan mayor
 3. Kerusakan total/kehilangan
 4. Kecelakaan pengemudi/penumpang
 5. Tanggung jawab pihak ke-3
 - c. Service Rutin (termasuk penggantian *spare part*);
 - d. Memiliki *Hotline Call Center* yang melayani selama 24 jam
 - e. Penggantian unit kendaraan apabila
 1. Diperlukan perbaikan/ service membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam;
 2. Terjadi kerusakan mayor;
 3. Perpanjangan STNK;atau
 4. Terjadi kecelakaan atau mogok.

Verifikasi SLA dilakukan dengan melihat surat pernyataan kemampuan memenuhi SLA yang disampaikan peserta

- 4) Surat pernyataan kepemilikan (milik sendiri/sewa/leasing/sewa beli/ dukungan sewa dan lainnya) dari masing-masing fasilitas/ peralatan/ perlengkapan yang diperlukan :
 - (a) bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
 - (b) bukti pembayaran Sewa Beli (contoh *invoice* uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
 - (c) surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa
- 5) menyampaikan surat keterangan alamat perusahaan,
- 6) tenaga teknis/terampil:

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Pendidikan
1	Tenaga Trampil sebanyak 3 orang (ahli mesin (montir)	Minimal 2 tahun	SMK
			-

Keterangan

(1) melampirkan Ijazah

(2) melampirkan Daftar riwayat pengalaman kerja (curriculum vitae)

3. Syarat Harga

- a. Melampirkan surat pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh penawar atau wakil sah Badan Usaha (apabila Berbadan Usaha) dan bermaterai;
- b. Harga sudah termasuk:
 - 1) Overhead dan Keuntungan; dan
 - 2) Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan-perundangan

C. Mekanisme Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik

1. Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki akun sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat.
2. Selanjutnya, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan:
 - a. Upload scan bukti dokumen syarat penyedia dan syarat Produk sebagaimana tersebut diatas;
 - b. Input informasi spesifikasi produk dan harga Kabupaten/Kota pada aplikasi Katalog Elektronik.

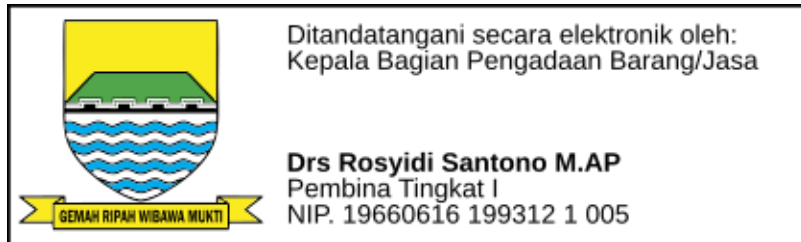
Adapun Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik dapat di unduh pada laman www.e-katalog.lkpp.go.id

3. Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman barang/jasa katalog elektronik ini mengacu pada surat keputusan Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dapat diunduh pada website www.jdih.lkpp.go.id.
4. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bandung, 2 Maret 2022

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
u.b.



Format Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk
dan Harga

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah badan usaha]

Nomor : _____[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Identitas

Jabatan : _____

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi_____ [pilih yang sesuai dan atas
untuk nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa:

1. PT/CV/Firma/Koperasi_____ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajiban harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili

bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materai Rp 10.000,- dan
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam
badan usaha]*

Format Surat Pernyataan Kemampuan Memenuhi Service Level Agreement (Sla)
Produk

**SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN MEMENUHI SERVICE LEVEL
AGREEMENT (SLA) PRODUK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
Nomor Identitas : _____ [diisi nomor KTP/ SIM/ Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/ CV/ Firma/ Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan
atas nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan
bahwa:

1. Kami memastikan dan menjamin produk yang tayang pada Katalog Elektronik telah sesuai dan memenuhi *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan (terlampir).
2. Kami bertanggung jawab atas pemenuhan Service Level Agreement (SLA) sebagai berikut
 - a. usia kendaraan:
 - b. asuransi *All Risk* dengan perlindungan dan manfaat sekurang kurangnya meliputi:
 - 1) Kerusakan minor
 - 2) Kerusakan mayor
 - 3) Kerusakan total/kehilangan
 - 4) kecelakaan pengemudi/penumpang,
 - 5) tanggung jawab pihak ke-3
 - c. biaya Klaim asuransi (*Deductible*) khusus kendaraan bus dengan supir.
 - d. service rutin mengacu kepada service manual book (termasuk penggantian *spare part*)
 - e. penggantian unit kendaraan apabila:
 - 1) diperlukan perbaikan/service membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam;
 - 2) Terjadi kerusakan mayor;
 - 3) perpanjangan STNK yang sudah melewati tanggal jatuh tempo; atau
 - 4) terjadi kecelakaan atau mogok.
 - f. Memiliki *hotline call center* yang melayani selama 24 jam.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], _____ [tanggal][bulan] 20 _____ [tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan materai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

*)Wakil Sah Badan Usaha adalah Direksi/Komisaris/Pengurus yang Namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir. Apabila dikuasakan, maka wajib melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi/Komisaris/Pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.